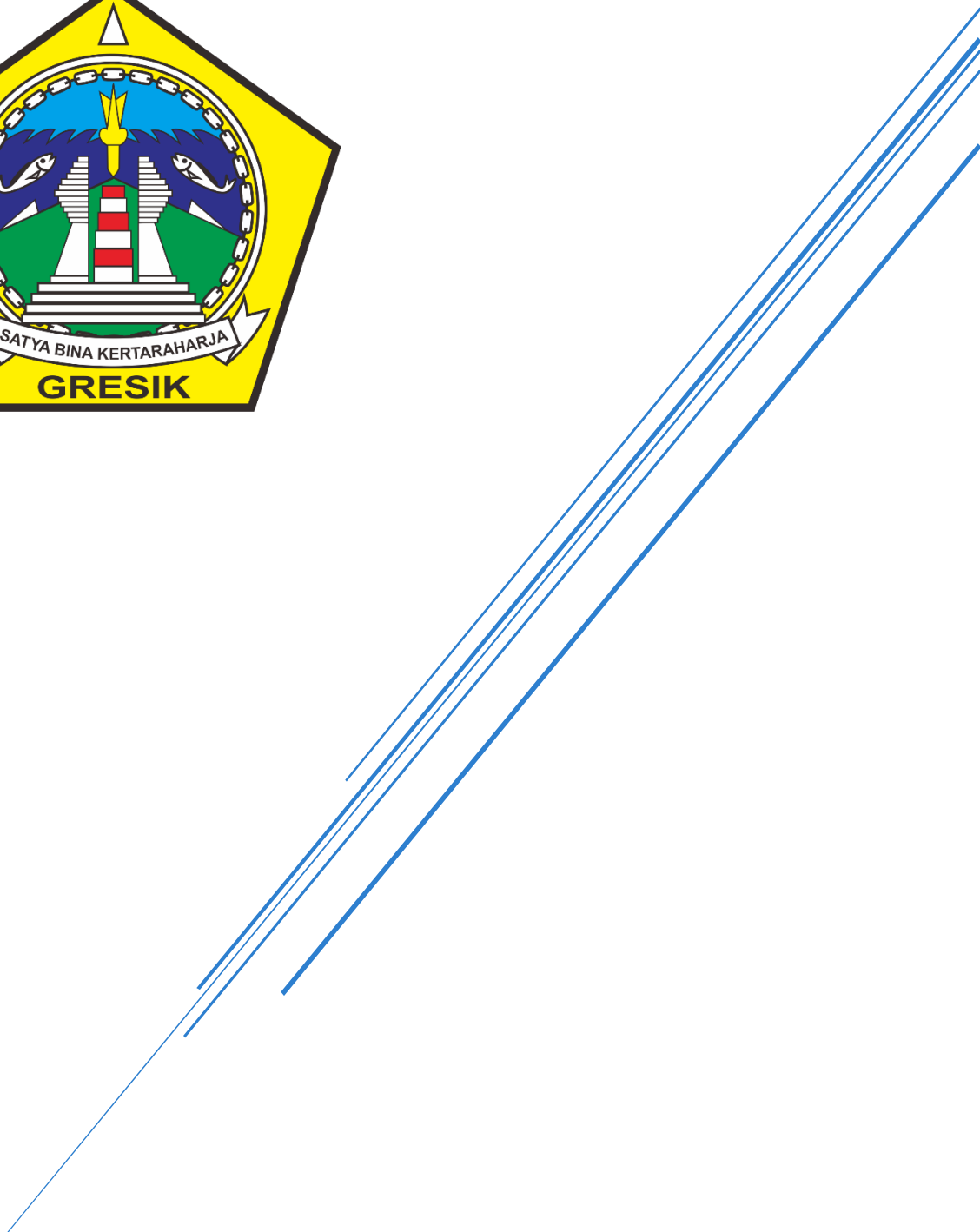


P-RENJA 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubaha Rencana kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah yang terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan atas pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif PD;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan;

Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Mengacu pada ketentuan dan alasan tersebut di atas, maka dilakukan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) "mengganti" Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan _ Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029;
21. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/734/HK/437.12/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2027.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026;
2. Menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik baik tahunan maupun lima tahunan;
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan keran ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada format 1.H.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan, sub kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, sub kegiatan, penghapusan kegiatan, sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan _ alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kKelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, sebagaimana terlampir pada format 1.I.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2026 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Hasil Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.1
Evaluasi Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026
Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2026	Capaian Target PD s/d Triwulan II Tahun 2026	
				Target Renja PD tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	(7)=(6)/(5)	9	10	(11)=(10)/(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%	57,42%	57,42%
8.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.1.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	5 dokumen	83%
8.1.1.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	420 laporan	84 laporan	84 laporan	100%	84 laporan	68 laporan	81%

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	220 paket	44 paket	44 paket	100%	44 paket	34 paket	77%
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	720 paket	144 paket	144 paket	100%	144 paket	71 paket	49%
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	6 paket	50%
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	1 dokumen	33%

8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	60 laporan	60 laporan	100%	60 laporan	29 laporan	48%
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	72 laporan	72 laporan	100%	6 laporan	3 laporan	50%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 unit	32 unit	32 unit	100%	32 unit	14 unit	44%
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	1 unit	50%

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90 kecamatan	18 kecamatan	18 kecamatan	100%	18 kecamatan	16 kecamatan	89%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	20 lembaga	20 lembaga	100%
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	100%	10.000 orang	5.700 orang	57%
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.270 orang	454 orang	454 orang	100%	10.000 orang	9.444 orang	94%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia	7,65	7,15	7,95	111%	7,25	-	-

	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100%	87,5%	87,5%
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	5.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	100%	1.000 orang	714 orang	71%

		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	20 laporan	1 laporan	5%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	72,54	71,79	71,79	100%	71,94	-	-
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	11,2%	11,2%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terverifikasi dan Tervalidasi di Kabupaten Gresik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	250 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan	19 laporan	38%

	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	3.000 orang	600 orang	600 orang	100%	1.000 orang	993 orang	99%

		dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.920 orang	384 orang	384 orang	100%	384 orang	-	-
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	74,09	73,09	73,09	100%	73,29	-	-
		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	33%	33%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	4.500 orang	900 orang	900 orang	100%	900 orang	621 orang	69%

	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	10 dokumen	83%

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 semua indikator tercapai 100%.

Sedangkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 sampai dengan triwulan II sebagian telah tercapai sesuai target bahkan diatas target, namun terdapat beberapa sub kegiatan yang masih dibawah 50 % yaitu:

1. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dimonitoring. Sub Kegiatan dimaksud telah direncanakan sebanyak 32 Unit, sampai dengan triwulan ke 2 telah terealisasi sebanyak 14 Unit. Jadi capaian kinerjanya hanya mencapai 44%. Hal ini disebabkan karena Peralatan dan Mesin Lainnya masih dalam keadaan baik dan layak dioperasikan;
2. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 10.000 Orang tercapai hanya 5.700 Orang sehingga capain kinerjanya sebesar 31%, hal ini dikarenakan kegiatan terpengaruh dengan jadwal peringatan Hari-hari Besar Kenegaraan;
3. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 20 Laporan tercapai hanya 1 Laporan sehingga capain kinerjanya sebesar 5%, hal ini dikarenakan kegiatan terpengaruh dengan jadwal pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan Partai Politik penerima Bantuan Keuangan;
4. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 50 Laporan tercapai hanya 19 Laporan sehingga capain kinerjanya sebesar 38%, hal ini dikarenakan sebagian kegiatan diagendakan pada triwulan III dan triwulan IV;
5. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan

indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Dari output kinerja yang ditargetkan sebanyak 384 Orang tercapai 0 Orang sehingga capain kinerjanya sebesar 0%, hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan menerima Bantuan Hibah;

Pada Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik melaksanakan 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Adapun keenam program yang dimaksud adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dengan mempertinbangkan kemampuan PD sehingga target kinerja sampai dengan Triwulan IV bisa tercapai;
2. Melakukan evaluasi terhadap rencana penyerapan anggaran triwulan III dan IV Tahun 2025;
3. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran sebelumnya agar efisiensi anggaran tercapai.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru yang sebelumnya belum tercover. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. GRESIK TAHUN 2026																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								51.662.775.098,00	29.221.544.017,56	29.742.832.017,56	-21.919.943.080,44							230.000.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							51.662.775.098,00	29.221.544.017,56	29.742.832.017,56	-21.919.943.080,44							230.000.000,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							51.662.775.098,00	29.221.544.017,56	29.742.832.017,56	-21.919.943.080,44							230.000.000,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD				100 Persen	100 Persen	5.468.757.346,00	5.864.018.078,56	5.894.306.078,56	-5.468.757.346,00							0,00		
		[Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah]	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	100	-	-	5.468.757.346,00	5.864.018.078,56	5.894.306.078,56	-	-	-	-	-	-	100	0,00	-	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan				100 Persen	100 Persen	45.017.200,00	162.289.000,00	162.289.000,00	117.271.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Pelaksanaan pelaporan kinerja dan keuangan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	31.299.200,00	26.979.000,00	26.979.000,00	-4.320.200,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				84 Laporan	84 Laporan	13.718.000,00	135.310.000,00	135.310.000,00	121.592.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan				100 Persen	100 Persen	4.072.125.542,00	4.303.593.048,74	4.303.593.048,74	231.467.506,74			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Pelaksanaan administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.072.125.542,00	4.303.593.048,74	4.303.593.048,74	231.467.506,74	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi				100 Persen	100 Persen	705.339.404,00	823.577.829,82	823.577.829,82	118.238.425,82			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	232.304.400,00	113.185.800,00	113.185.800,00	-119.118.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				144 Paket	9 Paket	28.989.200,00	33.813.900,00	33.813.900,00	4.824.700,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9 Paket	12.943.575,00	13.763.300,00	13.763.300,00	819.725,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2 Dokumen	12.538.400,00	10.314.800,00	10.314.800,00	-2.223.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	234.456.000,00	420.437.329,82	420.437.329,82	185.981.329,82	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	184.107.829,00	232.062.700,00	232.062.700,00	47.954.871,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur				100 Persen	100 Persen	180.972.000,00	127.560.000,00	157.848.000,00	-23.124.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearnfan Gresik yang Agamis	Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	4 Laporan	180.972.000,00	127.560.000,00	157.848.000,00	-23.124.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	465.303.200,00	446.998.200,00	446.998.200,00	-18.305.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.610.000,00	42.370.000,00	42.370.000,00	3.760.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	5 Unit	201.600.000,00	184.700.000,00	184.700.000,00	-16.900.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearnfan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	9 Unit	10.655.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	-5.165.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearnfan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		-	-	-	-	-	-	-	5.468.757.346,00	5.864.018.078,56	5.894.306.078,56	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	214.438.200,00	214.438.200,00	214.438.200,00	0,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearnfan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	100 %	2.884.218.621,00	2.359.876.539,00	2.384.876.539,00	-2.884.218.621,00							0,00		
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Kesadaran Berbangsa	18 78.10	- 18	18 76.60	-	-	2.884.218.621,00	2.359.876.539,00	2.384.876.539,00	-	-	-	-	-	-	18 76.90	0,00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				20 Lembaga	20 Lembaga	2.884.218.621,00	2.359.876.539,00	2.384.876.539,00	-499.342.082,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Menguatkan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan kepada lembaga pendidikan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10000 Orang	10000 Orang	726.307.626,00	591.452.300,00	591.452.300,00	-134.855.326,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10000 Orang	10000 Orang	2.157.910.995,00	1.768.424.239,00	1.793.424.239,00	-364.486.756,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Target Partisipasi Masyarakat				100 %	100 %	6.754.707.400,00	6.431.306.400,00	6.431.306.400,00	-6.754.707.400,00							0,00	
		[Meningkatkan etika dan budaya politik]	Indeks Demokrasi Indonesia Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 7.65	100 7.05	100 7.15	-	-	6.754.707.400,00	6.431.306.400,00	6.431.306.400,00	-	-	-	-	-	-	100 7.25	0,00	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Target Partisipasi Masyarakat				100 Persen	100 Persen	6.754.707.400,00	6.431.306.400,00	6.431.306.400,00	-323.401.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Pileg, Pilkada dan Pilpres		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	1000 Orang	554.131.400,00	257.406.000,00	257.406.000,00	-296.725.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				20 Laporan	20 Laporan	6.200.576.000,00	6.173.900.400,00	6.173.900.400,00	-26.675.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	619.535.000,00	395.633.000,00	395.633.000,00	-389.535.000,00							230.000.000,00	
		[Meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Indeks Kinerja Ormas Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	78.10 83	- 0	75 76.60	-	-	619.535.000,00	395.633.000,00	395.633.000,00	-	-	-	-	-	-	76.90 77	230.000.000,00	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga				100 Persen	100 Persen	619.535.000,00	395.633.000,00	395.633.000,00	-223.902.000,00			-	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Membina Dan Mengawasi Organisasi Masyarakat		230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				75 Orang	75 Orang	221.246.600,00	205.666.600,00	205.666.600,00	-15.580.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				50 Laporan	50 Laporan	398.288.400,00	189.966.400,00	189.966.400,00	-208.322.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi				100 %	100 %	2.693.889.883,00	977.600.000,00	977.600.000,00	-2.693.889.883,00							0,00	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat]	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	-	-	2.693.889.883,00	977.600.000,00	977.600.000,00	-	-	-	-	-	-	100	0,00	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi</i>				100 Persen	100 Persen	2.693.889.883,00	977.600.000,00	977.600.000,00	-1.716.289.883,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Memfasilitasi Konflik Kerukunan Umat Beragama		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				1000 Orang	1000 Orang	2.188.890.000,00	977.600.000,00	977.600.000,00	-1.211.290.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				1000 Orang	1000 Orang	504.999.883,00	0,00	0,00	-504.999.883,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa				100 %	100 %	33.241.666.848,00	13.193.110.000,00	13.659.110.000,00	-33.241.666.848,00							0,00	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Indeks Kewaspadaan Nasional Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 78.10	- 100	100 76.60	-	-	33.241.666.848,00	13.193.110.000,00	13.659.110.000,00	-	-	-	-	-	-	100 76.90	0,00	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi</i>				100 Persen	100 Persen	33.241.666.848,00	13.193.110.000,00	13.659.110.000,00	-19.582.556.848,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis	Membentuk FKDM Ditingkat Kecamatan Dan Desa		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				900 Orang	900 Orang	1.473.715.532,00	819.110.000,00	819.110.000,00	-654.605.532,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	31.767.951.316,00	12.374.000.000,00	12.840.000.000,00	-18.927.951.316,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis #GRESIK_BAROKA H Penguatan Keluhuran Budaya Berbasis Kearifan Gresik yang Agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							51.662.775.098,00	29.221.544.017,56	29.742.832.017,56	-566.670.460.887,07						230.000.000,00		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Akhir kata semoga perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Gresik, Juli 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

KABUPATEN GRESIK



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199003 1 008